

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Pengeluaran

2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran

2017-2021



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISSN : 2503-1961

Nomor Publikasi : 16000.2207

Katalog : 9302020.16

Ukuran Buku : 20 cm x 26 cm

Jumlah halaman : xiv + 86 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak Oleh :

CV. ItemPuteh Creation

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :

Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Penyunting :

Septi Elly Mulyana M.App.Ec

Penulis :

Rizki Handayani, S.ST, M.Si

Pengolah Data :

Rizki Handayani, S.ST, M.Si

Gambar Kulit :

Arie Almiyati, SE

Tata Letak :

Arie Almiyati, SE

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor, impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2022
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
Kepala,



Zulkipli

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)...	3
1.2 Manfaat Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori	22
2.6 Ekspor dan Impor	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017-2021	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran	32
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	43
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	44
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	49
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	50
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	51
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	53
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	54

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PENGELUARAN, 2017-2021	59
	4.1 PDRB (Nominal)	59
	4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	60
	4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	61
	4.4 Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB	62
	4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	62
	4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	63
	4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	64
	4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	65
	4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	67
	4.10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	68
BAB V	PENUTUP	73
LAMPIRAN		77
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	32
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	33
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	35
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	36
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	37
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	38
Tabel 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	40
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	41
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	42
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRP Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	43
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021.....	45
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	48
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	50
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	51

Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	52
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	53
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	59
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2017-2021	61
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2017-2021	61
Tabel 20	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	62
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2017-2021	63
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	64
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	65
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Luar Negeri, Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	66
Tabel 25	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Antar Provinsi, Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	67
Tabel 26	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	68
Tabel 27	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Sumatera Selatan, 2017- 2021	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB <i>adh</i> Berlaku dan <i>adh</i> Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021	34
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<https://sumsel.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021	77
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021	78
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021	79
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021	80
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021.....	81
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

1.2 MANFAAT STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri/daerah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol dan tembakau
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan perbaikan rutin rumah
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan akomodasi
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Hasil Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SK-KRT), dalam bentuk pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan setiap triwulan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas dan SK-KRT. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah

mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke-1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SK-LNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu

sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)

- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
 - d. Output Bank Indonesia (BI)
 - e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.
2. Metode Penghitungan
- a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)
- Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

<p>PK-P ADHB =</p> <p>Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia</p>

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

- b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang

dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan

menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ *arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “ *supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (*adh*) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh* berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh* Konstan, maka PMTB *adh* Berlaku tersebut di “ *deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh* Berlaku maupun *adh* Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain

yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara:

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*.

Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

c. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2017-2021

<https://sumsel.bps.go.id>

Adanya perubahan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d 2020 tak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pada awal tahun 2020, pandemi virus, yang dikenal dengan nama Covid-19 melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina diklaim memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat namun belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan pasien penderita Covid-19. Kondisi ini membuat kasus positif terus bertambah signifikan. Bahkan pemerintah membuat rumah sakit darurat untuk menampung para pasien.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengambil berbagai strategi dan langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Pada awal pandemi terjadi, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan sekolah serta bekerja dari rumah. Bahkan beberapa daerah menerapkan *lockdown* sebagai antisipasi darurat dimana masyarakat untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan guna menghindari ancaman penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas lagi. Seluruh aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan tempat transaksi ekonomi, mulai dari kantor, toko, pusat perbelanjaan, sampai bandara pun ditutup. Hanya toko atau supermarket yang menjual kebutuhan pokok yang masih diperbolehkan untuk tetap buka. Kondisi ini tidak hanya membuat kehidupan sosial masyarakat berubah namun juga membuat perekonomian terguncang, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menyelamatkan ekonomi yang terganggu akibat dari pandemi covid-19 ini, akhirnya pemerintah menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Dimana beberapa aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Para karyawan sudah mulai bekerja di kantor atau perusahaan meskipun masih dibatasi jumlahnya. Namun pendidikan mulai dari level dasar hingga perguruan tinggi masih menerapkan pembelajaran daring (*online*). Pada tahun 2021 ini, pandemi masih menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dengan munculnya varian covid-19 yang baru.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	257 277,12	277 771,06	296 904,98	296 555,35	307 655,30
2. Konsumsi LNPRT	5 688,64	6 358,15	7 240,99	6 748,58	7 130,46
3. Konsumsi Pemerintah	29 902,58	32 460,27	36 686,87	32 465,00	34 555,60
4. PMTB	146 998,04	157 634,55	160 152,72	163 051,12	163 215,57
5. Perubahan Inventori	189,64	-972,55	-731,37	-1 972,33	80,65
6. Ekspor Luar Negeri	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
7. Impor Luar Negeri	9 996,64	17 164,53	14 836,97	17 034,07	15 739,36
8. Net Exim Antar Provinsi	-105 502,06	-104 995,03	-95 336,81	-81 383,12	-91 730,66
Total PDRB	382 885,70	419 392,16	453 402,71	456 647,86	491 566,45

Data di atas menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Kondisi perekonomian Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2020 perekonomian di Sumatera Selatan mengalami guncangan dikarenakan adanya wabah virus Covid-19. Perubahan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan pada total PDRB.

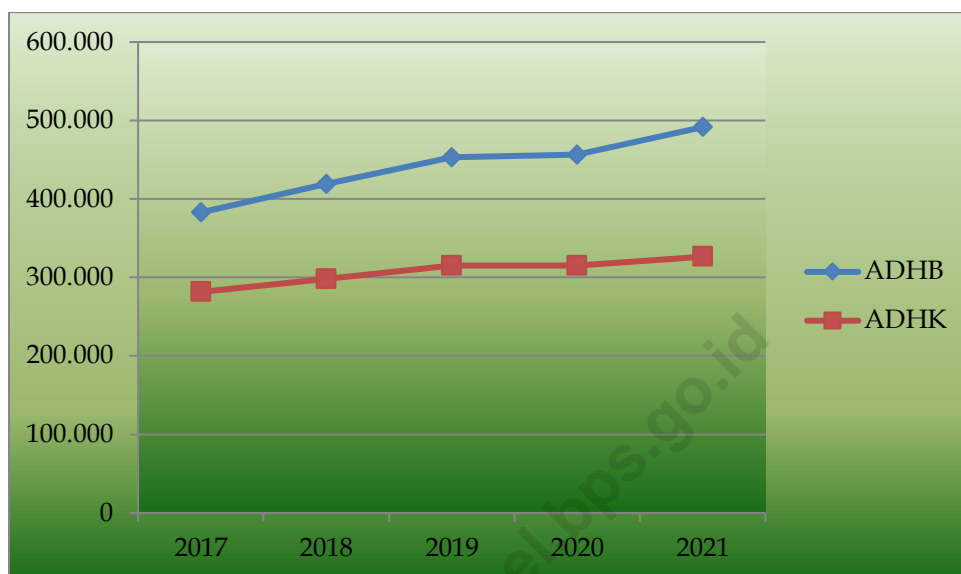
Nilai PDRB Sumatera Selatan (adh Berlaku) selama periode tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	175 670,78	183 420,98	190 641,45	186 943,08	190 560,72
2. Konsumsi LNPRT	4 202,88	4 563,10	5 009,23	4 710,91	4 806,55
3. Konsumsi Pemerintah	20 167,19	21 604,63	22 801,46	19 869,06	20 444,95
4. PMTB	107 287,54	111 301,18	113 186,34	114 605,19	111 007,10
5. Perubahan Inventori	313,21	-227,60	-319,38	-1 331,43	54,85
6. Ekspor Luar Negeri	56 994,36	60 403,70	59 085,55	55 295,30	68 587,31
7. Impor Luar Negeri	7 538,07	11 735,80	10 038,85	11 905,17	9 639,57
8. Net Exim Antar Provinsi	-75 526,87	-70 846,13	-64 901,05	-53 057,73	-59 413,98
Total PDRB	281 571,01	298 484,07	315 464,75	315 129,22	326 407,93

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017-2021 gambaran tentang perkembangan ekonomi Sumatera Selatan berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rp)



Dari grafik di atas nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPR (PK-LNPR), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2017-2021 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Kecenderungan perdagangan internasional Sumatera Selatan dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi "surplus". Perdagangan internasional Sumatera Selatan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor. Ekspor ke luar negeri mempunyai peran yang besar yaitu sekitar 12 s.d 18 persen, artinya produk Sumatera Selatan juga mampu menembus pasar internasional. Demikian halnya impor luar negeri,

sekitar 2 s.d 4 persen permintaan domestik Sumatera Selatan masih bergantung pada luar negeri, baik untuk permintaan akhir maupun untuk pengeluaran kapital yang dilakukan di Sumatera Selatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,19	66,23	65,48	64,94	62,59
2. Konsumsi LNPRT	1,49	1,52	1,60	1,48	1,45
3. Konsumsi Pemerintah	7,81	7,74	8,09	7,11	7,03
4. PMTB	38,39	37,59	35,32	35,71	33,20
5. Perubahan Inventori	0,05	-0,23	-0,16	-0,43	0,02
6. Ekspor Luar Negeri	15,23	16,29	13,97	12,75	17,58
7. Impor Luar Negeri	2,61	4,09	3,27	3,73	3,20
8. Net Exim Antar Provinsi	-27,55	-25,04	-21,03	-17,82	-18,66
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai andil yang cukup besar dengan kontribusi sekitar 33 s.d 39 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7-8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2017-2021 perdagangan antar provinsi Sumatera Selatan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor antar provinsi, menunjukkan bahwa nilai net exim antar provinsi selalu bernilai negatif. Perdagangan domestik (antar provinsi) Sumatera Selatan menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”. Hal ini cukup wajar, karena wilayah Sumatera Selatan bukanlah daerah sentra industri seperti yang ada di Pulau Jawa, jadi untuk memenuhi kebutuhan permintaan akhir dan pengeluaran kapital kita masih banyak membutuhkan *supply* barang dan jasa dari wilayah provinsi lainnya.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,01	4,41	3,94	-1,94	1,94
2. Konsumsi LNPRT	3,06	8,57	9,78	-5,96	2,03
3. Konsumsi Pemerintah	8,66	7,13	5,54	-12,86	2,90
4. PMTB	5,90	3,74	1,69	1,25	-3,14
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	72,65	5,98	-2,18	-6,41	24,04
7. Impor Luar Negeri	-43,47	55,69	-14,46	18,59	-19,03
8. Net Exim Antar Provinsi	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Hingga tahun 2019, Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,74 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 6,01 persen. Namun, akibat dari pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020 menyebabkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Namun, pada tahun 2021 kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mulai pulih sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 3,58 persen.

Sementara itu indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Sumatera Selatan dari tahun 2017 s.d 2021 secara berturut-turut

¹ Indeks perkembangan

masing-masing menunjukkan 135,98 persen (2017); 140,51 (2018); 143,73 persen (2019), 144,91 persen (2019) dan 150,60 persen (2021).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017- 2021

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	146,45	151,44	155,74	158,63	161,45
2. Konsumsi LNPRT	135,35	139,34	144,55	143,25	148,35
3. Konsumsi Pemerintah	148,27	150,25	160,90	163,39	169,02
4. PMTB	137,01	141,63	141,49	142,27	147,03
5. Perubahan Inventori	60,55	427,31	229,00	148,14	147,05
6. Ekspor Luar Negeri	102,34	113,07	107,17	105,28	125,97
7. Impor Luar Negeri	132,62	146,26	147,80	143,08	163,28
8. Net Exim Antar Provinsi	139,69	148,20	146,90	153,39	154,39
Total PDRB	135,98	140,51	143,73	144,91	150,60

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebesar 60 persen PDRB Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh konsumsi akhir rumah tangga, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung menurun. Tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 67,19 persen dan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 62,59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga semakin berpikir untuk menabung (*saving*) daripada untuk konsumsi (*consumption*).

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	257 277,12	277 771,06	296 904,98	296 555,35	307 655,30
b. ADHK 2010	175 670,78	183 420,98	190 641,45	186 943,08	190 560,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	67,19	66,23	65,48	64,94	62,59
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	127 938,10	136 435,49	143 657,84	144 485,02	148 016,24
b. ADHK 2010	87 357,11	90 092,65	92 242,10	91 080,72	91 680,79
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	31 121,04	33 185,24	34 941,52	35 123,39	35 979,50
b. ADHK 2010	21 249,68	21 913,26	22 435,81	22 141,14	22 285,59
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	3,01	4,41	3,94	-1,94	1,94
b. Per RT	1,71	3,13	2,39	-1,26	0,66
c. Per kapita	1,69	3,12	2,38	-1,31	0,65
Jumlah RT (<i>unit</i>)	2 010 950	2 035 915	2 066 751	2 052 499	2 078 524
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	8 266	8 370	8 497	8 443	8 551

Dalam kurun waktu 2017-2021, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Konsumsi akhir rumah pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif, berkisar 3-4 persen. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga. Namun pada tahun 2020, konsumsi akhir rumah mengalami penurunan sebesar 1,94 persen. Hal ini tidak terlepas dari akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat dari berbagai

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (*atas dasar harga konstan/ADHK 2010*)

aspek. Akibat dari pandemi ini, tidak sedikit perusahaan yang akhirnya menutup usahanya dan terpaksa memberhentikan karyawannya. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar saja begitu sulit. Berkurangnya kasus positif covid-19 membuat kondisi perekonomian membaik. Sehingga pada tahun 2021, konsumsi akhir rumah tangga mengalami perbaikan dimana terlihat mulai terjadinya pertumbuhan sebesar 1,94 persen.

Konsumsi per rumah tangga, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010* terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2017, secara umum setiap rumah tangga di Sumatera Selatan menghabiskan dana sekitar 127.938,10 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang perumahan, Pendidikan dsb). Pengeluaran ini terus meningkat hingga menjadi 148.016,24 ribu rupiah pada tahun 2021. Jika melihat nominalnya dalam rupiah per bulan setiap rumah tangga melakukan konsumsinya pada level 10 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat sampai pada level 12 juta rupiah pada tahun 2021.

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 1-3 persen pada rentang waktu tahun 2017-2019 dan mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,13 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan perkembangan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sumatera Selatan meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" berkisar antara 1,69 s.d 3,12 persen. Namun pada tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita mengalami penurunan sebesar 1,31 persen. Peningkatan maupun penurunan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021³**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	56,12	56,41	56,84	57,67	57,53
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,17	4,10	4,01	4,06	4,10
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,48	10,25	10,04	10,04	10,11
d. Kesehatan & Pendidikan	7,18	7,06	7,02	7,32	7,40
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	13,16	13,11	13,15	12,31	12,06
f. Hotel & Restoran	5,36	5,58	5,49	4,94	5,02
g. Lainnya	3,53	3,49	3,45	3,66	3,78
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan masing-masing sebesar 3,01 persen dan 4,41 persen pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian sempat tumbuh melambat pada tahun 2019 menjadi sebesar 3,94 persen dan terkontraksi sebesar 1,94 persen pada tahun 2020. Selanjutnya konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di 1,94 persen pada tahun 2021. Sementara itu konsumsi per kapita meningkat dari 1,69 persen di tahun 2017 menjadi 3,12 di tahun 2018. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen dan ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat. Kecuali tahun 2020, meskipun jumlah penduduk bertambah, namun justru konsumsi rumah tangga secara "riil" menurun. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatas hingga hilangnya kesempatan masyarakat untuk mencari pendapatan yang pada akhirnya mempengaruhi konsumsi barang dan jasa.

Secara rata-rata dari tahun 2017-2021 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Sumatera Selatan, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 56-57 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	3,34	5,19	4,58	-1,42	1,30
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,55	3,12	2,48	-0,68	0,60
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,01	2,26	2,47	-0,62	2,68
d. Kesehatan & Pendidikan	2,47	2,68	3,35	2,71	3,77
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	3,41	4,06	3,90	-5,74	1,28
f. Hotel & Restoran	2,87	5,61	2,77	-10,07	5,11
g. Lainnya	2,55	3,24	2,92	2,48	5,36

Pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk setiap sub kelompok konsumsi menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Pandemi Covid-19 membuat orang beralih menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Hal ini tercermin dari sub kelompok konsumsi kesehatan dan kelompok lainnya tetap mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar sebesar 3,77 persen dan 5,36 persen. Masyarakat menjadi lebih peduli dengan kesehatan dengan mengkonsumsi berbagai suplemen dan vitamin penambah daya tahan tubuh, selalu menyediakan *handsanitizer*, mencuci tangan dan selalu memakai masker.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021⁴

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,77	3,16	3,00	2,79	2,17
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,08	2,81	2,12	1,86	4,09
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,83	3,34	2,10	0,56	1,67
d. Kesehatan & Pendidikan	4,94	3,44	2,75	1,46	1,03
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6,03	3,30	3,23	-0,85	0,40
f. Hotel & Restoran	4,91	6,32	2,39	-0,04	0,30
g. Lainnya	4,45	3,60	2,46	3,34	1,83

Sub kelompok konsumsi lainnya mengalami kontraksi, dengan kisaran 0,6 persen hingga mencapai 10 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat pandemi Covid-19, seluruh aktivitas masyarakat sangat terbatas dan dihimbau sebisa mungkin untuk tidak melakukan aktivitas keluar rumah. Bahkan ada pelarangan untuk melakukan pulang kampung saat Idul Fitri, penutupan tempat rekreasi dan hiburan. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih untuk menyiapkan sendiri makanannya ketimbang membeli di luar karena dianggap lebih aman.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan harga (inflasi) tertinggi yang terjadi pada tahun 2018 pada sub kelompok makanan. Pada sub kelompok pakaian dan alas kaki, sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga serta sub kelompok kesehatan dan pendidikan terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2020, terjadinya penurunan harga untuk sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya serta sub kelompok hotel dan restoran, masing-masing sebesar 0,85 persen dan 0,04 persen. Kondisi ini dikarenakan pada saat diberlakukannya era new normal, banyak usaha-usaha terkait sub

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

kelompok tersebut menurunkan harga dengan memberikan potongan harga atau diskon sebagai strategi untuk menarik konsumen kembali. Sedangkan pada tahun 2021, peningkatan harga (inflasi) tertinggi yang terjadi pada semua sub kelompok konsumsi rumah tangga, dimana sub kelompok tertinggi pada pakaian dan alas kaki dan terendah pada sub kelompok hotel dan restoran.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dari tahun 2017-2021, peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,45-1,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian Sumatera Selatan semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	5 688,64	6 358,15	7 240,99	6 748,58	7 130,46
b. ADHK 2010	4 202,88	4 563,10	5 009,23	4 710,91	4 806,55
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,49	1,52	1,60	1,48	1,45
Pertumbuhan ⁵ %	3,06	8,57	9,78	-5,96	2,03

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2019, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh Berlaku sebesar 5,7 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 7,2 triliun rupiah. Namun di tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menurun menjadi 6,7 triliun rupiah. Konsumsi LNPRT adh Konstan 2010 juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,06 pada tahun 2017, hingga mencapai pertumbuhan 9,78 persen pada tahun 2019. LNPRT tidak luput dari efek pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2020 yang

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

mengalami kontraksi sebesar 5,96 persen. Akibat Pandemi Covid-19, banyak kegiatan-kegiatan partai dan lembaga non profit lainnya ditunda. Bahkan sempat dikeluarkannya edaran pemerintah agar masyarakat melakukan ibadah di rumah masing-masing, termasuk kegiatan sholat Tarawih, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri. Ketika sudah diberlakukannya *Era New Normal*, kegiatan LNPRT pun tetap terbatas. Kegiatan Pilkada di beberapa daerah di Sumatera Selatan, perayaan Natal dan Tahun Baru pun tidak semeriah tahun sebelumnya. Musyawarah dan pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang kini dilakukan secara *virtual*. Namun, sejak tahun 2021 konsumsi akhir LNPRT mulai mengalami pertumbuhan sebesar 2,03 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 29,9 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 36,7 triliun rupiah, dan menurun menjadi 32,5 triliun rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan kembali mencapai 34,5 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019, kemudian menurun di tahun 2020, untuk kemudian tumbuh kembali di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas meskipun di tahun 2020 menjadi terhambat dikarenakan situasi pandemi yang melanda.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami kestabilan yaitu sekitar 7-8 persen. Sepanjang periode tersebut proporsi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 7,03 persen sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 8,09 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (*publik*). Kondisi tersebut dapat diartikan

bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, kecuali di tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini sejalan dengan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku sebesar 3,6 miliar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2019 menjadi 4,3 miliar rupiah dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 3,8 miliar rupiah, lalu meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 4,0 miliar rupiah.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	29 902,58	32 460,27	36 686,87	32 465,00	34 555,60
b. ADHK 2010	20 167,19	21 604,63	22 801,46	19 869,06	20 444,95
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,81	7,74	8,09	7,11	7,03
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3 617,11	3 878,02	4 317,53	3 845,09	4 041,19
b. ADHK 2010	2 439,49	2 581,10	2 683,41	2 353,25	2 390,98
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	219 342,88	245 829,22	277 709,96	245 842,68	272 858,36
b. ADHK 2010	147 931,35	163 616,88	172 601,02	150 459,32	161 437,65
Pertumbuhan ⁶					
a. Total konsumsi pemerintah	8,66	7,13	5,54	-12,86	2,90
b. Konsumsi per kapita	7,27	5,81	3,96	-12,30	1,60
c. Konsumsi per-pegawai	10,97	10,60	5,49	-12,83	7,30
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁷	136 328	132 044	132 105	132 056	126 643
Jumlah penduduk (000 org)	8 267	8 370	8 497	8 443	8 551

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan selama tahun 2017 sampai tahun 2019 (lihat Tabel 11). Pertumbuhan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen dan kemudian terus

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁷ Tidak termasuk polisi dan militer

melambat di tahun 2018 dan 2019 menjadi sebesar 5,81 persen dan 3,96 persen hingga akhirnya berkontraksi sebesar 12,83 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, konsumsi pemerintah per kapita mampu tumbuh kembali hingga 1,60 persen.

Rata-rata konsumsi per-pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang sama dengan per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah tumbuh pesat hingga mencapai 10,97 persen. Selanjutnya mengalami perlambatan di tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 10,60 persen dan 5,49 persen dan akhirnya mengalami kontraksi sebesar 12,83 persen di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 7,30 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per-penduduk maupun per-pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 untuk total konsumsi pemerintah yaitu sebesar 8,66 persen; untuk konsumsi per kapita 7,27 persen; dan untuk konsumsi per-pegawai 10,97 persen.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, sekitar 66-75 persen pengeluaran pemerintah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 dan menurun di tahun 2020 dan tahun 2021 (lihat Tabel 12). Begitu juga dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah yang terus mengalami kenaikan terkecuali di tahun 2020. Pada tahun 2017 proporsinya mencapai 67,14 persen dan terus mengalami kenaikan hingga 75,30 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 68,05 persen pada tahun 2020 hingga 65,12 persen pada tahun 2021 dari total pengeluaran konsumsi pemerintah. Sebaliknya, proporsi konsumsi individu secara nominal mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, dengan proporsinya sebesar 36,99 persen dan terus mengalami penurunan hingga 24,70 persen pada tahun 2019. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 31,95 persen.

Perubahan struktur pengeluaran konsumsi pemerintah ini tidak lepas kaitannya dengan pandemi Covid-19. Untuk menangani pandemi tersebut, pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran untuk belanja-belanja yang tidak bisa dilakukan, seperti perjalanan

dinas dan kegiatan lainnya, kemudian merealokasi anggaran tersebut untuk dana kesehatan dan bantuan sosial.

Konsumsi individu pemerintah yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2017, konsumsi individu pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 1,76 persen, kemudian berkontraksi sebesar 0,98 persen di tahun 2018 dan sebesar 9,47 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk penanganan Covid-19 berupa pembelian hazmat, obat-obat-obatan, masker medis, pemberian dana insentif bagi tenaga kesehatan, hingga bantuan berupa barang konsumsi untuk masyarakat menyebabkan konsumsi individu pemerintah meningkat signifikan di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah gencar-gencarnya melakukan pemberian vaksinasi covid-19 sehingga konsumsi individu tumbuh signifikan menjadi 13,45 persen.

Konsumsi kolektif pemerintah yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah bidang ekonomi, ketahanan dan ketertiban, lingkungan hidup, pelayanan dan fasilitas umum juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sama seperti konsumsi individu pemerintah, konsumsi kolektif pemerintah pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, berkisar 11 hingga hampir 13 persen. Namun pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan konsumsi kolektif pemerintah mengalami kontraksi yang cukup dalam, masing-masing sebesar 21,19 persen dan 2,84 persen.

Jika dilihat secara total, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 8,66 persen di tahun 2017. Selanjutnya terjadi perlambatan pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 7,13 persen dan 5,54 persen. Pada tahun 2020, kembali mengalami kontraksi sebesar 12,86 persen. Secara nominal, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 sangat besar. Namun besaran nominal tersebut tidak semuanya dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah karena sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, serta pembelian peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang tergolong ke dalam penambahan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) serta pemberian bantuan tunai berupa uang yang merupakan transaksi keuangan. Namun, pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2021 mulai mengalami pertumbuhan sebesar 2,90 persen. Hal ini disebabkan

karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada pengeluaran konsumsi individu pemerintah.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁸ (Miliar Rp)					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	20 077,63	22 947,12	27 625,16	22 091,66	22 502,44
(%)	67,14	70,69	75,30	68,05	65,12
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	9 824,95	9 513,15	9 061,72	10 373,34	12 053,16
(%)	32,86	29,31	24,70	31,95	34,88
Total Konsumsi (Miliar Rp)	29 902,58	32 460,27	36 686,87	32 465,00	34.555,60
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	12,93	11,64	12,96	-21,19	-2,84
b. Konsumsi Individu	1,76	-0,98	-9,47	8,16	13,45
Total Konsumsi	8,66	7,13	5,54	-12,86	2,90
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁹					
a. Konsumsi Kolektif	7,92	2,37	6,58	1,47	4,83
b. Konsumsi Individu	4,37	-2,22	5,22	5,83	2,42
Total Konsumsi	6,61	1,33	7,09	1,55	3,44

Hal lain yang patut dicermati adalah perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah berfluktuasi secara gradual dari 136.328 orang (2017) menjadi 126.643 orang (2021). Sedangkan jumlah penduduk meningkat dari 8.267 ribu orang pada tahun 2017 menjadi 8.551 ribu orang pada tahun 2021. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut meningkat dari 60 (2017) menjadi 66 (2021). Hal ini berarti pada tahun 2017, setiap

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

satu pegawai pemerintah melayani sekitar 60 penduduk dan meningkat menjadi sekitar 66 penduduk pada tahun 2021.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁰. Kapital berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah ini menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan dari 5,90 persen (2017) menjadi -3,14 persen (2021). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap, memiliki pertumbuhan yang cenderung searah dengan pertumbuhan PMTB secara total, yakni mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, pertumbuhan sub komponen bangunan mencapai 7,51 persen hingga hanya mencapai 0,63 persen pada tahun 2021.

Pertumbuhan sub komponen non bangunan lebih berfluktuatif. Pertumbuhan pada tahun 2017 mencapai 0,80 persen. Kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 0,25 persen dan 8,42 persen. Pada tahun 2020, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh pengadaan pemerintah berupa alat-alat kesehatan, peralatan pendukung pelayanan kesehatan hingga peningkatan fasilitas kesehatan. Namun, pada tahun 2021 mengalami kontraksi lebih dalam lagi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 17,76 persen.

¹⁰ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Sumatera Selatan, 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	189,64	-972,55	-731,37	-1.972,33	80,65
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	313,21	-227,60	-319,38	-1.331,43	54,85
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,05	-0,23	-0,16	-0,43	0,02

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih lanjut. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya termasuk pula dalam ekspor.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Selatan, 2017- 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor LN (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
b. ADHK 2010	56 994,36	60 403,70	59 085,55	55 295,30	68 587,31
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	15,23	16,29	13,97	12,75	17,58
Struktur Ekspor LN ¹³					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	57 593,68	67 256,40	62 070,90	57 846,34	86 341,44
(%)	98,74	98,47	98,02	99,36	99,93
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	734,71	1 043,83	1 251,41	371,00	57,45
(%)	1,26	1,53	1,98	0,64	0,07
Total Ekspor LN (<i>Miliar Rp</i>)	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Barang	74,36	5,72	-2,26	-5,41	24,55
b. Jasa	-3,94	27,11	2,93	-71,24	-84,51
Total Ekspor LN	72,65	5,98	-2,18	-6,41	24,04

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Sumatera Selatan berupa barang, berkisar 98 hingga 99 persen, sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Secara total, nilai ekspor Sumatera Selatan ke luar negeri menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2017, nilai ekspor mencapai 58,33 triliun rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 sebesar 63,32 triliun rupiah. Namun pada tahun 2019, nilai ekspor mulai menurun hingga akhirnya hanya sebesar 58,22 triliun rupiah di tahun 2020. Secara ADHK, nilai ekspor mengalami peningkatan yang paling signifikan di tahun 2017, yaitu sebesar 72,65 persen. Sebaliknya, kontraksi ekspor luar negeri terdapat terjadi di tahun 2020 yang diakibatkan karena adanya penutupan sementara akses transportasi penumpang dan barang, baik transportasi darat, laut dan udara akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

2021 dengan telah berkurangnya kasus covid-19, membuat pemerintah mulai tidak memberlakukan lagi pembatasan akses transportasi sehingga ekspor luar negeri mulai tumbuh positif yaitu sebesar 24,04 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Sumatera Selatan, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Impor LN (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	9 996,64	17 164,53	14 836,97	17 034,07	15 739,36
b. ADHK 2010	7 538,07	11 735,80	10 038,85	11 905,17	9 639,57
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	2,61	4,09	3,27	3,73	3,20
Struktur Impor LN ¹⁵					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	7 029,37	12 486,28	8 263,34	15 145,53	15 084,27
(%)	70,32	72,74	55,69	88,91	95,84
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	2 967,27	4 678,24	6 573,63	1 888,54	655,09
(%)	29,68	27,26	44,31	11,09	4,16
Total Impor LN (<i>Miliar Rp</i>)	9 996,64	17 164,53	14 836,97	17 034,07	15 739,36
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁶ (%)					
a. Barang	-52,49	58,86	-29,40	79,14	-11,54
b. Jasa	3,58	48,08	23,90	-70,02	-84,56
Total Impor LN	-43,47	55,69	-14,46	18,59	-19,03

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Sumatera Selatan terhadap ekonomi atau produk negara lain. Pada tahun 2017 ketergantungan dari produk impor menurun hingga 43 persen dan tahun 2018 kembali naik hingga 56 persen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Sumatera Selatan di luar negeri baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Sumatera Selatan pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 cukup berfluktuasi (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2018, nilai impor mengalami peningkatan dari 9,99 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 17,16 triliun rupiah di tahun 2018. Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 sebesar 55,69 persen. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pembangunan LRT dan pabrik-pabrik di Sumatera Selatan yang membutuhkan mesin-mesin sehingga banyak sekali barang yang diimpor dari luar negeri. Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi sekitar 55-95 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu dengan metode *Cross Hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *Cross Hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2021

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	382 885,70	419 392,16	453 402,71	456 647,86	491 566,45
- ADHK 2010	281 571,01	298 484,07	315 464,75	315 129,22	326 407,93
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
- ADHB	46 315,05	50 104,67	53 359,10	54 084,41	57 487,44
- ADHK 2010	34 059,71	35 659,82	37 125,75	37 323,24	38 172,58
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,16	4,70	4,11	0,53	2,28
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	8 266 983	8 370 320	8 497 196	8 443 244	8 550 849
Pertumbuhan	1,30	1,25	1,52	-0,63	1,27

PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sumatera Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2017, pertumbuhan per kapita sebesar 4,16 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,70 persen. Namun mengalami perlambatan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebesar 4,11 persen dan 0,53 persen dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2,28 persen di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1,34 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Sumatera Selatan (sekitar 65 sampai 68 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Data di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2017, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 4 kali produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio pada tahun 2018 (4,07) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor dan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan nilai ekspor pun semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, perkembangan ekspor dari tahun 2017 ke tahun 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekspor untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	257 277,12	277 771,06	296 904,98	296 555,35	307 655,30
Ekspor LN (ADHB) (Miliar Rp)	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor LN	4,41	4,07	4,69	5,09	3,56

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	257 277,12	277 771,06	296 904,98	296 555,35	307 655,30
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	146 998,04	157 634,55	160 152,72	163 051,12	163 215,57
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,75	1,76	1,85	1,82	1,88

Seperti halnya terhadap ekspor luar negeri, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stabil, dari sebesar 1,75 persen pada tahun 2017 menjadi 1,88 persen pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena kenaikan nilai investasi dan konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan yang relatif sama.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	240 977,34	257 277,12	277 771,06	296 904,98	296 555,35
b. LNPRT	5 311,19	5 688,64	6 358,15	7 240,99	6 755,67
c. Pemerintah	26 313,94	29 902,58	32 460,27	36 686,87	32 465,00
Jumlah	272 602,47	292 868,34	316 589,48	340 832,84	335 776,02
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	353 866,96	382 885,70	419 392,16	453 639,81	458 430,30
Proporsi	77,04	76,49	75,49	75,13	73,24

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 70 persen). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/provinsi. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor LN (ADHB) (Miliar Rp)	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	146 998,04	157 634,55	160 152,72	163 051,12	163 215,57
Rasio Ekspor terhadap PMTB (%)	39,68	43,33	39,54	35,70	52,94

Pada periode 2017-2021, ekspor Sumatera Selatan ke luar negeri mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (Tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, rasio ekspor terhadap PMTB mengalami peningkatan, yaitu dari 39,68 pada tahun 2017 menjadi 43,33 persen pada tahun 2018. Kenaikan rasio selama periode 2 tahun tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Sedangkan pada tahun 2019, rasio rasio ekspor terhadap PMTB mengalami penurunan menjadi 39,54 persen dan turun lagi pada tahun 2020 hingga menjadi 35,70 persen. Namun, rasio ekspor terhadap PMTB mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 menjadi 52,94 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan yang cukup besar pada ekspor nilai ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2017-2021 berkisar antara 2,08 (2017) sampai 3,56 (2021). Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari PDRB Provinsi Sumatera Selatan

tergantungan terhadap produk luar negeri dan luar provinsi Sumatera Selatan. Mulai tahun 2019 PDRB Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan nilai yang positif lebih besar yang artinya ketergantungan akan impor semakin rendah di provinsi ini.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	382 885,70	419 392,16	453 402,71	456 647,86	491 566,45
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	184 263,61	200 634,17	163 191,63	142 279,41	138 235,85
Rasio PDRB terhadap Impor	2,08	2,09	2,78	3,21	3,56

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 23, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir regional Sumatera Selatan, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar provinsi, dengan rentang 21-32 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 67-78 persen dari hasil produksi regional Sumatera Selatan. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 567,15 triliun rupiah (2017) menjadi sebesar 620,0 triliun rupiah (2018). Sejak tahun 2019, permintaan (akhir) masyarakat mengalami penurunan menjadi sebesar 616,6 triliun rupiah dan 598,9 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 629,8 triliun rupiah.

Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi regional Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, penyediaan barang dan jasa sebesar 382,88 triliun rupiah, meningkat menjadi 419,4 triliun rupiah (2018), 453,4 triliun rupiah (2019), 456,6 triliun rupiah (2020) dan mencapai 491,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Karena produk di dalam regional Sumatera Selatan tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi dengan nilai masing-masing tahun sebesar 184,3 triliun rupiah (2017), 200,6 triliun rupiah (2018), 163,2 triliun rupiah (2019), 142,3 triliun rupiah (2020) dan 138,2 triliun rupiah (2021).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)	382 885,70	419 392,16	453 402,71	456 647,86	491 566,45
%	67,51	67,64	73,53	76,24	78,05
Total nilai Impor ADHB					
%	32,49	32,36	26,47	23,76	21,95
Total Permintaan Akhir¹ (Miliar Rp)					
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dan luar provinsi dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah

¹ Termasuk diskrepansi statistik

defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Luar Negeri, Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	9 996,64	17 164,53	14 836,97	17 034,07	15 739,36
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	48 331,75	51 135,71	48 485,33	41 183,26	70 659,52
Rasio Ekspor terhadap Impor	5,83	3,98	4,27	3,42	5,49

Selama periode 2017-2021, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan dengan luar negeri, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “tabungan luar negeri”. Surplus perdagangan luar negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2021 tercatat masing-masing sebesar 48,33 triliun rupiah; 51,14 triliun rupiah; 48,49 triliun rupiah; 41,18 triliun rupiah dan 70,66 triliun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2021. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,83 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,42 persen.

Sebaliknya, selama periode 2017-2021, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi lainnya dalam negeri, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Hal ini karena adanya permintaan yang cukup besar dari dalam provinsi tetapi barang dan jasanya masih banyak yang didatangkan dari luar provinsi. Defisit perdagangan antar Provinsi di Sumatera Selatan yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2021 berada pada kisaran 81,4 triliun rupiah hingga 105,5 triliun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor turun dari 0,39 pada tahun 2017 menjadi 0,25 pada tahun 2021.

Tabel 25. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Antar Provinsi, Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	68 764,90	78 474,61	53 017,84	43 862,22	30 765,83
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	174 266,97	183 469,65	148 354,65	125 245,34	122 496,49
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	-105 502,06	-104 995,03	-95 336,81	-81 383,12	-91 730,66
Rasio ekspor thdp Impor	0,39	0,43	0,36	0,35	0,25

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dan impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 dan +1 ($-1 < RPI < +1$) Jika RPI berkisar antara minus 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh impor sedangkan apabila berkisar positif 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor. Rasio perdagangan internasional dalam kurun waktu

2017-2021 selalu berkisar positif 1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Provinsi Sumatera Selatan selalu didominasi oleh kegiatan ekspor.

**Tabel 26. Rasio Perdagangan Internasional
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN ADHB (X) (Miliar Rp)	58 328,39	68 300,23	63 322,31	58 217,33	86 398,89
Nilai Impor LN ADHB (M) (Miliar Rp)	9 996,64	17 164,53	14 836,97	17 034,07	15 739,36
(X - M) (Miliar Rp)	48 331,75	51 135,71	48 485,33	41 183,26	70 659,52
(X +M) (Miliar Rp)	68 325,04	85 464,76	78 159,28	75 251,40	102 138,25
R P I	0,71	0,60	0,62	0,55	0,69

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*). ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dengan : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Data di bawah menunjukkan besaran ICOR cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ICOR sebesar 7,29, kemudian menurun menjadi 6,58 di tahun 2018 lalu 6,67 di tahun 2019 dan 9,84 di tahun 2021. Ini artinya penambahan kapital tidak selalu diiringi dengan penambahan sejumlah output (keluaran).

**Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio
Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	281 571,01	298 484,07	315 464,75	326 407,93
Perubahan (Miliar Rp)	14 713,61	16 913,06	16 980,68	11 278,71
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	107 287,54	111 301,18	113 186,34	111 007,10
ICOR	7,29	6,58	6,67	9,84

Catatan : Penghitungan ICOR tahun 2020 tidak dilakukan karena ada faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan nilai ICOR tidak dapat dijadikan sebagai dasar analisis sebagaimana terjadi pada kondisi normal.



BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2017 hingga 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Sumatera Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 hingga 2021 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut penggunaan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat telah disajikan di sini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).



LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	257 277 122	277 771 062	296 904 975	296 555 352	307 655 303
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	119 598 565	130 620 608	141 730 947	143 433 349	148 758 175
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	24 776 075	26 056 761	27 037 299	27 581 798	28 226 382
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10 734 912	11 381 340	11 910 849	12 049 721	12 618 194
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	17 427 382	18 458 373	19 308 419	19 627 617	20 881 695
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9 526 646	10 026 468	10 491 856	10 155 070	10 209 516
1.f. Hotel dan Restoran	8 834 954	9 419 872	9 969 426	10 701 857	10 916 714
1.g. Lainnya	17 768 151	19 231 070	20 708 665	18 809 825	19 174 915
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5 688 641	6 358 147	7 240 994	6 748 580	7 130 463
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	29 902 576	32 460 274	36 686 875	32 465 000	34 555 601
3.a. Konsumsi Kolektif	20 077 629	22 947 119	27 625 157	22 091 660	22 502 439
3.b. Konsumsi Individu	9 824 946	9 513 155	9 061 717	10 373 341	12 053 162
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	146 998 035	157 634 550	160 152 717	163 051 119	163 215 567
4.a. Bangunan	118 907 013	129 949 095	133 549 443	134 748 631	139 247 425
4.b. Non-Bangunan	28 091 022	27 685 455	26 603 274	28 302 487	23 968 141
5. Perubahan Inventori	189 638	-972 552	-731 371	-1 972 335	80 650
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	58 328 394	68 300 232	63 322 306	58 217 333	86 398 886
6.a. Barang	57 593 685	67 256 398	62 070 896	57 846 337	86 341 437
6.b. Jasa	734 710	1 043 834	1 251 409	370 997	57 449
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	9 996 641	17 164 525	14 836 973	17 034 069	15 739 363
7.a. Barang	7 029 374	12 486 283	8 263 339	15 145 528	15 084 273
7.b. Jasa	2 967 266	4 678 242	6 573 634	1 888 541	655 090
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-105 502 063	-104 995 031	-95 336 808	-81 383 116	-91 730 657
8.a. Ekspor	68 764 905	78 474 614	53 017 845	43 862 222	30 765 832
8.b. Impor	174 266 968	183 469 645	148 354 653	125 245 337	122 496 489
P D R B	382 885 701	419 392 157	453 402 714	456 647 864	491 566 450

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	175 670 775	183 420 980	190 641 454	186 943 078	190 560 725
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	82 853 054	87 510 792	91 877 811	90 454 225	91 777 342
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13 652 716	14 007 675	14 293 151	14 211 049	14 243 458
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7 658 613	7 897 877	8 094 126	8 039 088	8 087 600
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11 364 495	11 621 891	11 907 882	12 063 189	12 664 777
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6 508 793	6 655 533	6 820 706	6 549 302	6 446 038
1.f. Hotel dan Restoran	5 964 621	6 124 256	6 315 212	6 680 245	6 757 145
1.g. Lainnya	14 038 514	14 704 096	15 305 332	14 374 295	14 608 161
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 202 878	4 563 101	5 009 229	4 710 914	4 806 555
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	20 167 185	21 604 627	22 801 457	19 869 056	20 444 948
3.a. Konsumsi Kolektif	12 951 443	14 459 441	16 332 958	12 872 506	12 507 475
3.b. Konsumsi Individu	7 215 743	7 145 186	6 468 499	6 996 550	7 937 473
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	107 287 538	111 301 185	113 186 337	114 605 190	111 007 101
4.a. Bangunan	82 851 174	86 925 863	90 863 584	91 110 818	91 686 438
4.b. Non-Bangunan	24 436 364	24 375 321	22 322 753	23 494 372	19 320 664
5. Perubahan Inventori	313 214	-227 600	-319 379	-1 331 427	54 847
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	56 994 360	60 403 701	59 085 553	55 295 303	68 587 309
6.a. Barang	56 304 649	59 527 032	58 183 154	55 035 732	68 547 108
6.b. Jasa	689 711	876 670	902 399	259 571	40 201
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	7 538 068	11 735 795	10 038 849	11 905 172	9 639 573
7.a. Barang	5 316 921	8 446 654	5 963 504	10 683 283	9 450 866
7.b. Jasa	2 221 147	3 289 142	4 075 345	1 221 889	188 707
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-75 526 870	-70 846 130	-64 901 050	-53 057 726	-59 413 983
8.a. Ekspor	58 186 354	68 356 668	46 801 780	36 668 976	24 088 346
8.b. Impor	133 713 224	139 202 798	111 702 831	89 726 702	83 502 329
P D R B	281 571 013	298 484 068	315 464 752	315 129 217	326 407 929

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	67,19	66,23	65,48	64,94	62,59
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	31,24	31,15	31,26	31,41	30,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,47	6,21	5,96	6,04	5,74
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,80	2,71	2,63	2,64	2,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,55	4,40	4,26	4,30	4,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,49	2,39	2,31	2,22	2,08
1.f. Hotel dan Restoran	2,31	2,25	2,20	2,34	2,22
1.g. Lainnya	4,64	4,59	4,57	4,12	3,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,49	1,52	1,60	1,48	1,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	7,81	7,74	8,09	7,11	7,03
3.a. Konsumsi Kolektif	5,24	5,47	6,09	4,84	4,58
3.b. Konsumsi Individu	2,57	2,27	2,00	2,27	2,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	38,39	37,59	35,32	35,71	33,20
4.a. Bangunan	31,06	30,99	29,45	29,51	28,33
4.b. Non-Bangunan	7,34	6,60	5,87	6,20	4,88
5. Perubahan Inventori	0,05	-0,23	-0,16	-0,43	0,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	15,23	16,29	13,97	12,75	17,58
6.a. Barang	15,04	16,04	13,69	12,67	17,56
6.b. Jasa	0,19	0,25	0,28	0,08	0,01
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2,61	4,09	3,27	3,73	3,20
7.a. Barang	1,84	2,98	1,82	3,32	3,07
7.b. Jasa	0,77	1,12	1,45	0,41	0,13
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-27,55	-25,04	-21,03	-17,82	-18,66
8.a. Ekspor	17,96	18,71	11,69	9,61	6,26
8.b. Impor	45,51	43,75	32,72	27,43	24,92
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,43	4,41	3,94	-1,94	1,94
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,75	5,62	4,99	-1,55	1,46
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,23	2,60	2,04	-0,57	0,23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,17	3,12	2,48	-0,68	0,60
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,82	2,26	2,46	1,30	4,99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,05	2,25	2,48	-3,98	-1,58
1.f. Hotel dan Restoran	4,07	2,68	3,12	5,78	1,15
1.g. Lainnya	6,34	4,74	4,09	-6,08	1,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,20	8,57	9,78	-5,96	2,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	-4,66	7,13	5,54	-12,86	2,90
3.a. Konsumsi Kolektif	-1,77	11,64	12,96	-21,19	-2,84
3.b. Konsumsi Individu	-9,00	-0,98	-9,47	8,16	13,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,19	3,74	1,69	1,25	-3,14
4.a. Bangunan	8,58	4,92	4,53	0,27	0,63
4.b. Non-Bangunan	6,97	-0,25	-8,42	5,25	-17,76
5. Perubahan Inventori	-87,14	-172,67	40,32	316,88	-104,12
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-13,69	5,98	-2,18	-6,41	24,04
6.a. Barang	-14,10	5,72	-2,26	-5,41	24,55
6.b. Jasa	10,27	27,11	2,93	-71,24	-84,51
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-32,98	55,69	-14,46	18,59	-19,03
7.a. Barang	-37,93	58,86	-29,40	79,14	-11,54
7.b. Jasa	14,90	48,08	23,90	-70,02	-84,56
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	4,24	-6,20	-8,39	-18,25	11,98
8.a. Ekspor	7,62	17,48	-31,53	-21,65	-34,31
8.b. Impor	6,06	4,11	-19,76	-19,67	-6,94
P D R B	5,04	6,01	5,69	-0,11	3,58

Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	146,45	151,44	155,74	158,63	161,45
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	144,35	149,26	154,26	158,57	162,09
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	181,47	186,02	189,16	194,09	198,17
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	140,17	144,11	147,15	149,89	156,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	153,35	158,82	162,15	162,71	164,88
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	146,37	150,65	153,82	155,06	158,38
1.f. Hotel dan Restoran	148,12	153,81	157,86	160,20	161,56
1.g. Lainnya	126,57	130,79	135,30	130,86	131,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	135,35	139,34	144,55	143,25	148,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	148,27	150,25	160,90	163,39	169,02
3.a. Konsumsi Kolektif	155,02	158,70	169,14	171,62	179,91
3.b. Konsumsi Individu	136,16	133,14	140,09	148,26	151,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	137,01	141,63	141,49	142,27	147,03
4.a. Bangunan	143,52	149,49	146,98	147,90	151,87
4.b. Non-Bangunan	114,96	113,58	119,18	120,46	124,05
5. Perubahan Inventori	60,55	427,31	229,00	148,14	147,05
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	102,34	113,07	107,17	105,28	125,97
6.a. Barang	102,29	112,98	106,68	105,11	125,96
6.b. Jasa	106,52	119,07	138,68	142,93	142,91
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	132,62	146,26	147,80	143,08	163,28
7.a. Barang	132,21	147,83	138,57	141,77	159,61
7.b. Jasa	133,59	142,23	161,30	154,56	347,15
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	139,69	148,20	146,90	153,39	154,39
8.a. Ekspor	118,18	114,80	113,28	119,62	127,72
8.b. Impor	130,33	131,80	132,81	139,59	146,70
P D R B	135,98	140,51	143,73	144,91	150,60

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,64	3,40	2,84	1,86	1,77
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	3,13	3,40	3,35	2,79	2,22
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,56	2,50	1,69	2,60	2,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,08	2,81	2,12	1,86	4,09
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,50	3,57	2,09	0,34	1,34
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,45	2,93	2,11	0,80	2,15
1.f. Hotel dan Restoran	4,88	3,84	2,63	1,48	0,85
1.g. Lainnya	5,98	3,33	3,45	-3,29	0,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,93	2,95	3,74	-0,90	3,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,58	1,33	7,09	1,55	3,44
3.a. Konsumsi Kolektif	7,23	2,37	6,58	1,47	4,83
3.b. Konsumsi Individu	-0,82	-2,22	5,22	5,83	2,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,15	3,37	-0,09	0,55	3,35
4.a. Bangunan	-0,01	4,16	-1,68	0,62	2,69
4.b. Non-Bangunan	4,75	-1,20	4,93	1,08	2,98
5. Perubahan Inventori	-83,15	605,76	-46,41	-35,31	-0,74
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	9,84	10,49	-5,22	-1,76	19,65
6.a. Barang	10,11	10,46	-5,58	-1,48	19,84
6.b. Jasa	1,01	11,78	16,47	3,07	-0,01
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,21	10,29	1,05	-3,19	14,12
7.a. Barang	0,58	11,81	-6,26	2,31	12,58
7.b. Jasa	3,67	6,47	13,41	-4,18	124,60
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-4,94	6,09	-0,88	4,42	0,66
8.a. Ekspor	-0,16	-2,86	-1,32	5,59	6,78
8.b. Impor	-0,77	1,13	0,77	5,10	5,10
P D R B	2,55	3,33	2,29	0,82	3,93

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumel.lit.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*. Jakarta.

_____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.

_____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.

Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series. No. 29. Washington DC. 1979.

Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3. New York, 1968.

_____, *Input-Output Table and Analysis*. Studies in Methods. Series F No. 14 Rev 1. New York. 1973.

_____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50. New York, 1988.

_____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 76. New York, 2000.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward. Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC. 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Kapten Anwar Sastro No.1131 Palembang
Telepon: (0711) 353174, Fax: (0711) 353174
Email: bps1600@bps.go.id

ISSN : 2503-1961



9 772503 196009